



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) BPPP MEDAN TAHUN 2025

Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Medan



AKUNTABEL | TRANSPARAN | PROFESIONAL | INOVATIF

Melatih, Mendidik, dan Memberdayakan untuk
Mewujudkan SDM Perikanan yang Kompeten dan Berdaya Saing

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan mengacu pada dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Medan, 05 Mei 2026

Kepala Balai,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Ridloudin, S.T., M.P.

NIP: 19790515 200502 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

1.1. Kondisi umum

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan

Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sejarah berdirinya BPPP Medan dimulai pada tahun 1961 dengan nama Sekolah Perikanan Laut (SPL) Belawan, pada tahun 1962 berubah menjadi Sekolah Usaha Perikanan Pertama (SUPP) Belawan. Kemudian pada tahun 1972 SUPP Belawan berubah nama menjadi *Training Center Perikanan* (TC Perikanan) Belawan, dan pada tahun 1975 TC Perikanan Belawan dikembangkan dan dirubah namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Keterampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Belawan. Pada tahun 1978 P3KP3 Belawan diganti nama dengan Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Belawan. Pada tahun 2001, Balai Keterampilan Penangkapan Ikan berubah nama menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan, terakhir pada tahun 2017 sampai sekarang menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Sebagai salah satu UPT bidang Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, BPPP Medan bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini pembangunan sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan yaitu pro-poor (pengetasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan) dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian), dimana sektor Kelautan dan Perikanan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan.

1.1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nornor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, bahwa BPPP Medan mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Penyusunan Bahan Kebijakan, Program dan Anggaran, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan dan Penyuluhan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok BPPP Medan menyelenggarakan fungsi -fungsi yaitu :

1. Penyusunan Bahan Kebijakan Pelatihan dan Penyuluhan;
2. Penyusunan Program dan Anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan;
3. Pelatihan Teknis dan manajerial di bidang perikanan;
4. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
5. Pemantaua keutuhan pembentukan jaringan pengembangantenaga teknis dan manejerial dibidang perikanan;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
7. Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas Penyulkuh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Pelatihan dan Perikanan (BPPP) Medan, memiliki Pejabat Struktural yaitu :

1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi
3. Kepala Seksi Pelatihan
4. Kepala Seksi Penyuluhan

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Persuratan, Perlengkapan dan urusan rumah tangga (Umum) serta pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub. Bagian Tata Usaha dibantu 3 (tiga) orang pelaksana antara lain :

1. Pelaksana Urusan Kepegawaian
2. Pelaksana Urusan Keuangan
3. Pelaksana Urusan Perlengkapan Rumah Tangga dan Umum

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah konsep manusia sebagai subyek atau pelaku yang diharapkan memiliki ilmu dan bermartabat tinggi karena BPPP Medan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan unsur administrasi dan unsur teknis dengan baik. Dalam hal ini BPPP Medan didukung oleh pegawai sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang PNS, PPPK sebanyak 2 (dua) orang, PPNPN sebanyak 4 (empat) orang dan PJLP sebanyak 4 (empat) orang. Jumlah Tenaga kerja yang proporsional yang dipetakan melalui Analisa Jabatan telah terwujud dalam komposisi jabatan saat ini.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 403/MENSJ/KP.431/ XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil, maka Penyuluh Perikanan masuk ke Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Medan yang terdiri dari 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Daftar Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Dalam mendukung kinerja BPPP Medan, kualitatif SDM yang memadai sangat diperlukan khususnya untuk pengelolaan dalam fungsi kediklatan. Tabel berikut ini merupakan gambaran Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BPPP berdasarkan tingkat pendidikannya.

Tabel 2. Kualitatif Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian					Jumlah
		PNS Balai	PPNPN	PJLP	Penyuluh	PPPK	
1	S2	7	-	-	11	-	18
2	S1/D4	25	3	1	142	99	270
3	D-IV	-	-	-	25	-	25
4	D-III	-	-	1	33	-	34
5	D-I	-	1	-	-	-	1
6	SLTA	12	-	1	22	-	35
7	SLTP	-	-	-	-	-	-
8	SD	1	-	1	-	-	2
Jumlah		45	4	4	233	99	385

2.2.2. Seksi Program, Evaluasi dan Monitoring

Seksi Program, Evaluasi dan Monitoring merupakan salah satu seksi yang ada pada struktur organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Adapun tugas Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Melakukan penyiapan bahan kebijakan
2. Penyusunan program dan anggaran
3. Pengelolaan kinerja
4. Monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan
5. Penyusunan laporan

2.2.3. Seksi Pelatihan

Seksi Pelatihan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan administrasi.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pelatihan Aparatur
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan Non Aparatur/masyarakat
3. Mernbuat juknis pelaksanaan pelatihan

Pada tahun 2025 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tidak melaksanakan pelatihan baik bagi aparatur maupun non aparatur /masyarakat dikarenakan anggaran diblokir karena adanya efisiensi anggaran.

2.2.4. Seksi Penyuluhan

Pada tahun 2025 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan telah ditetapkan sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Penyuluh Perikanan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas yaitu menyiapkanbahan pengembangan penyuluhan, dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Jumlah Penyuluh Perikanan yang berada di Satminkal BPPP Medan adalah 154 orang yang berasal dari 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barnt, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.5. Kelompok Fungsional Widyiswara dan Instruktur

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian masing- masing. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan memiliki kelompok jabatan fungsional yaitu Kelompok Fungsional Widyaiswara dan kelompok fungsional Instruktur.

A. Widyaiswara BPPP Medan

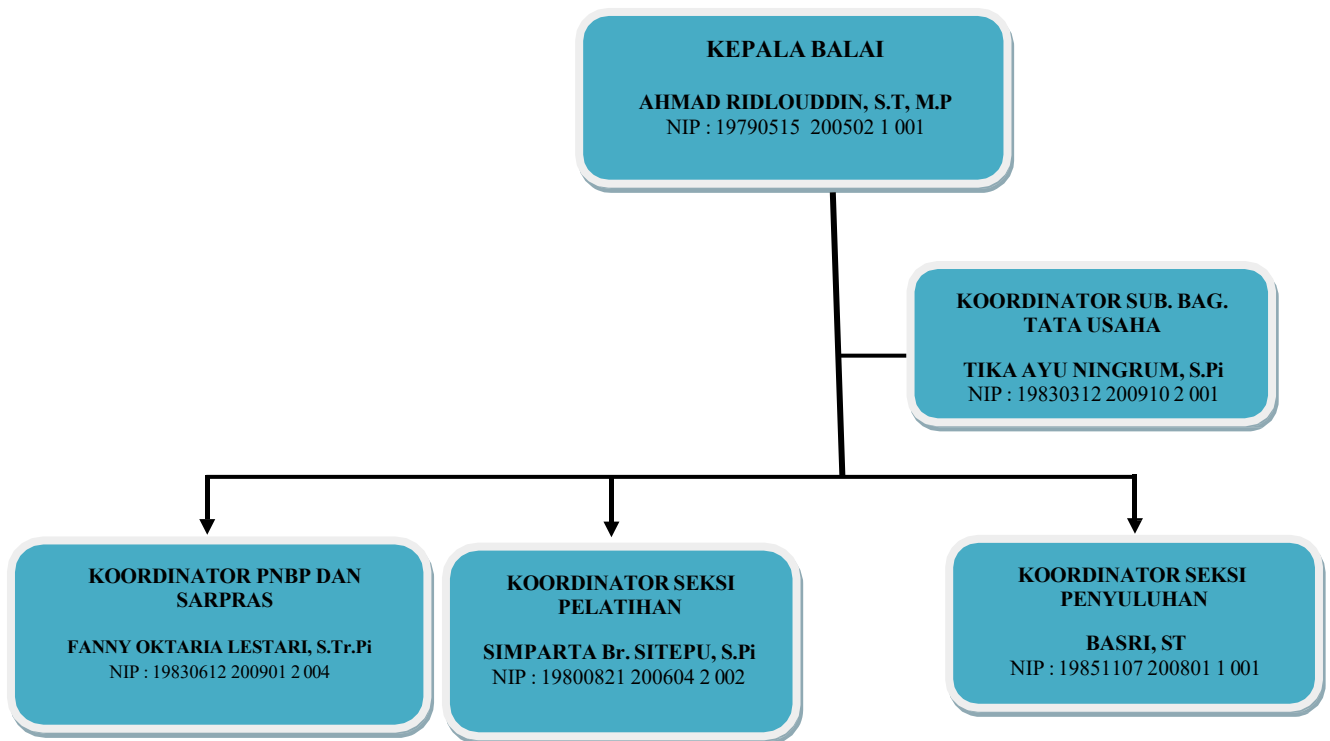
Widyaiswara BPPP Medan sampai dengan bulan Maret 2024 sudah tidak ada lagi karena sudah pensiun.

B. Instruktur BPPP Medan

Instruktur BPPP Medan pada tahun 2025 berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari 9 (sembilan) orang Instruktur Muda, 3 (tiga) orang Instruktur Pertama, dan 1 (satu) orang Instruktur Pelaksana Lanjutan.

STRUKTUR ORGANISASI

**BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : 87/PERMEN-KP/2020, TANGGAL 28 DESEMBER 2020**



Dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah diprogramkan oleh Kementerian Kelautan dan perikanan tersebut, BPPP Medan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Pusat Riset, Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, membuat program kerja dan arah kebijakan yang dituangkan dalam visi, misi, serta sasaran strategis yang mendukung pada arah kebijakan Pusat Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu:

VISI :

Visi BPPSDM mengacu pada Visi KKP adalah Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**.

MISI :

Misi BPPSDM mengacu pada 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Peningkatan Kualitas Manusia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Ketiga misi di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Dalam rangka penunjang keberhasilan menuju kesuksesan, maka Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan menyusun visi yang mewujudkan jati diri dan fungsinya sebagai UPT Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

“Menjadikan Balai sebagai lembaga diklat yang mampu meningkatkan kualitas SDM dalam menunjang pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berwawasan lingkungan”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan mengemban tugas untuk melakukan langkah- langkah pelatihan bagi SDM Perikanan secara terpadu dengan mengemban misi untuk :

1. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
2. Penyusunan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan
3. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan
4. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan
5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenagateknis dan manajerial dibidang perikanan
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
7. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat begaipelaku utama dan pelaku usaha
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluhan pegawai negeri sipil (PNS), swadaya, dan swasta
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KKP dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2015 – 2019. Dengan demikian tujuan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan dalam penyusunan laporan keuangan BPPP Medan adalah :

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Medan menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPPP Medan.
3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya.

2. SASARAN

Sasaran strategis program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2015-2019 merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat) perspektif yakni :

1. *Stakeholder Perspective*
2. *Customer Perspective*
3. *Internal Process Perspective*
4. *Learn And Growth Perspective*

3. REVISI DIPA

Pada periode 31 Desember 2025 DIPA Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan telah diadakan direvisi sebanyak 17 kali :

1. *Revisi 1, Usulan Revisi Efisiensi Anggaran* sesuai Surat Usulan Revisi ke Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor B.432/BPPSDM/RC.420/II/2025, tanggal 14 Februari 2025.
2. *Revisi 2, Usulan Revisi Rekomposisi Blokir Efisiensi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025* sesuai Surat Usulan Revisi ke Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : B.673/BPPSDM/RC.420/III/2025, tanggal 17 Maret 2025.
3. *Revisi 3, Usulan Revisi Relaksasi Blokir Efisiensi Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025* sesuai Surat Usulan Revisi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor B.747/BPPSDM/RC.420/III/2025, tanggal 25 Maret 2025.
4. *Revisi 4*, Revisi Pemutakhiran Data POK sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.862/BPPP.MDN/RC.420/IV/2025, Tanggal 15 April 2025.
5. *Revisi 5*, Revisi Pemutakhiran Halaman III DIPA sesuai Surat Usulan Revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor B.883/BRSDM.BPPP.MDN/RC.420/IV/2025, Tanggal 16 April 2025.
6. *Revisi 6*, Revisi Pemutakhiran Halaman III DIPA sesuai Surat Usulan Revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor B.975/BRSDM.BPPP.MDN/RC.420/VI/2025, Tanggal 12 Juni 2025.
7. *Revisi 7*, Revisi Pagu Anggaran Tetap, Revisi pergeseran anggaran antar SATKER lingkup BPPSDM, Revisi rekomposisi blokir anggaran (kode blokir A) antar SATKER lingkup BPPSDM dan Revisi perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA sesuai Surat Usulan Revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor B.1510/BRSDM.BPPP.MDN/RC.420/VII/2025, Tanggal 10 Juli 2025.
8. *Revisi 8*, Revisi Pemutakhiran Data POK sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.1757/BPPP.MDN/RC.420/VIII/2025, Tanggal 19 Agustus 2025.
9. *Revisi 9*, Revisi Pagu Anggaran berubah, Revisi anggaran buka bokir, Revisi pergeseran pagu belanja operasional ke non operasional dan Revisi perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA sesuai Surat Usulan Revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor B.1914/BPPSDM/RC.420/VIII/2025, Tanggal 20 Agustus 2025.

10. *Revisi 10*, Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA sesuai Surat Usulan

Revisi ke Kanwil Nomor B.2130/BPPP.MDN/RC.420/X/2025, Tanggal 03 Oktober 2025.

11. *Revisi 11*, Revisi Administrasi Pemutakhiran Halaman III DIPA sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.2385/BPPP.MDN/RC.420/X/2025, Tanggal 13 Oktober 2025.
12. *Revisi 12*, Revisi Pemutakhiran Data POK sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.2433/BPPP.MDN/RC.420/X/2025, Tanggal 17 Oktober 2025.
13. *Revisi 13*, Revisi Pemutakhiran Data POK sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.2636/BPPP.MDN/RC.420/XI/2025, Tanggal 10 November 2025.
14. *Revisi 14*, Pengesahan Revisi Anggaran sesuai Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : S-986/AG/AG.3/2025 Tanggal 19 November 2025.
15. *Revisi 15*, Revisi Pemutakhiran Data POK sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.2775/BPPP.MDN/RC.420/XI/2025, Tanggal 24 November 2025.
16. *Revisi 16*, Revisi Pemutakhiran Data POK sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.2937/BPPP.MDN/RC.420/XII/2025, Tanggal 4 Desember 2025.
17. *Revisi 17*, Revisi Pemutakhiran Data POK sesuai Surat Usulan Revisi ke Kanwil Nomor B.2988/BPPP.MDN/RC.420/XII/2025, Tanggal 9 Desember 2025.

4. JUMLAH SDM

Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sebanyak 298 orang pegawai yang terdiri dari 45 orang pegawai negeri sipil Balai dan termasuk didalamnya Penyuluh Perikanan sebanyak 154 orang dan 99 orang PPPK.

1. Eselon I	: -
2. Eselon III	: 1 orang
3. Analis Kepegawaian	: 2 orang
4. Pengelola PBJ	: 1 orang
5. APK APBN	: 3 org
6. Pranata Komputer	: 1 orang
7. Perencana	: 1 orang
8. Fungsional Umum	: 23 orang
9. Widyaiswara	: -
10. Instruktur	: 13 orang
11. PPPK	: 99 orang
12. Penyuluh Perikanan	: 154 orang

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK- BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dandinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau hargawajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah);**
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari **Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);**
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.

Realisasi

Pendapatan Negara
dan Hibah

Rp57.172.492,00

B.1 Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp57.172.492,00 atau mencapai 12.70 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp450.001.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan terdiri dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Budidaya (perolehan dari penjualan benih ikan), Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (pendapatan dari hasil samping pengolahan hasil perikanan), Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (pendapatan dari Lelang BMN), Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (Sewa Asrama, Sewa AULA, Sewa Ruang Kelas, Sewa Workshop), Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (pendapatan dari Pelatihan Sertifikasi Uji Kompetensi) dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (pph Pegawai) dan sudah mengacu pada PP Tarif PNPB Nomor 85 Tahun 2021. Pada Tahun 2025 realisasi PNPB mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga target IKU PNPB diturunkan menjadi Rp55.052.000,00 dari target awal senilai Rp450.001.000,00. Tetapi untuk tetap melaksanakan kegiatan sertifikasi penghasil PNPB sesuai arahan Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan agar menjalin Kerjasama dengan BLU BPPP Tegal untuk menghasilkan realisasi PNPB dengan mekanisme pembayaran BLU BPPP Tegal.

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,	Rp 1.565.000	Rp 3.501.980,00	223,77
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non	Rp 860.000	Rp 860.500,00	100,06
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp 3.250.000,00	0,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	Rp 14.200.000	Rp 47.440.000,00	334,08
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	Rp 433.376.000	Rp 2.120.000,00	0,49
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp -	Rp 12,00	0,00
Jumlah	450.001.000	Rp 57.172.492,00	12,70

Berdasarkan Tabel 6 (Penjelasan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun yang lalu). Penjelasan Realisasi Pendapatan berdasarkan pada Tabel.6.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	3.501.980,00	3.500.000,00	0,06
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	860.500,00	3.000.000,00	-71,32
Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin	3.250.000,00	74.000.000,00	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	2.400.000,00	
Pendapatan dari Penggunaan Sarpras sesuai dengan Tusi	47.440.000,00	12.790.000,00	270,91
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	2.120.000,00	591.800.000,00	-99,64
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	12,00	1.395,00	-99,14
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.053.514,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	2.989.735,00	-100,00
Pendapatan Denda Lainnya	-	3.048.000,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan	57.172.492,00	694.582.644,00	8,23

Realisasi Belanja
Negara
Rp73.753.979.840,00.

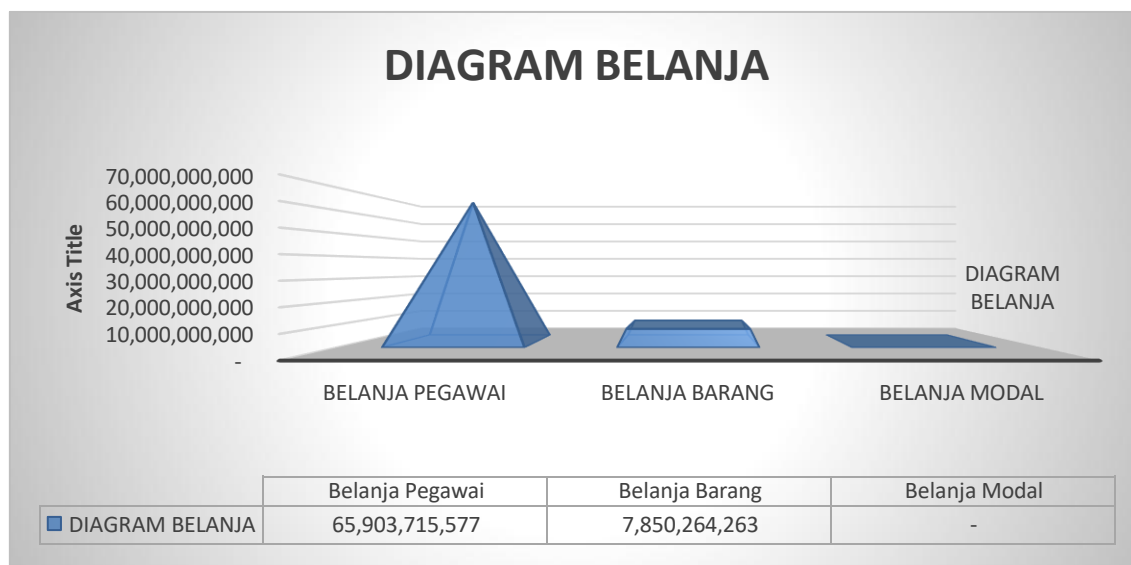
B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp73.753.979.840,00 atau 98.65 persen dari anggaran senilai Rp74.764.232.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2025 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja Pegawai	66.580.890.000,00	65.903.715.577,00
Belanja Barang	8.102.342.000,00	7.850.264.263,00
Belanja Modal	81.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	74.764.232.000,00	73.753.979.840,00

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA.2025 mengalami penurunan senilai 53.00 persen dibandingkan realisasi belanja pada TA.2024. Hal ini disebabkan karena adanya blokir/efisiensi anggaran di tahun 2025.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	65.903.715.577,00	60.347.058.934,00	9,21
Belanja Barang	7.850.264.263,00	20.771.166.081,00	(62,21)
Belanja Modal	-	654.737.000,00	0
Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	73.753.979.840,00	81.772.962.015,00	(53,00)

Belanja Pegawai
Rp65.903.715.577,00.

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan pada TA.2025 meliputi : Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; Belanja Vakasi; dan Tunjangan Kinerja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah

masing-masing senilai Rp65.903.715.577,00 dan Rp60.347.058.934,00 Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan senilai 9.21 persen dari realisasi belanja per 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena bertambahnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2025.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	65.903.715.577,00	60.347.058.934,00	9,21
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	0,00	0,00	-
Belanja Honorarium	0,00	0,00	-
Belanja Lembur	0,00	0,00	-
Belanja Vakasi	0,00	-	-
Jumlah Belanja Kotor	65.903.715.577,00	60.347.058.934,00	9,21
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	65.903.715.577,00	60.347.058.934,00	9,21

Belanja Barang
Rp7.850.264.263,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp7.850.264.263,00 dan Rp20.771.166.081,00 .

Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan senilai Rp5.625.225.070,00 atau 135.05 persen dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik/(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	Rp 302.481.667,00	Rp 418.391.550,00	Rp 115.909.883	38
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 4.826.358,00	Rp 14.671.900,00	Rp 9.845.542	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	Rp 124.704.000,00	Rp 111.504.000,00	Rp (13.200.000)	-11
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 178.855.240,00	Rp 296.545.110,00	Rp 117.689.870	66
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 33.591.290,00	Rp 101.524.130,00	Rp 67.932.840	202
Beban Bahan	Rp 18.940.932,00	Rp 2.774.484.968,00	Rp 2.755.544.036	14.548
Beban Honor Output Kegiatan	Rp 5.290.600.000,00	Rp 7.152.500.000,00	Rp 1.861.900.000	35
Beban Barang Non Operasional Lainnya	Rp 63.426.511,00	Rp 2.615.215.960,00	Rp 2.551.789.449	4.023
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	Rp 8.585.400,00	Rp 169.801.280,00	Rp 161.215.880	1.878
Beban Langganan Listrik	Rp 258.368.897,00	Rp 296.608.424,00	Rp 38.239.527	15
Beban Langganan Telepon	Rp 2.421.077,00	Rp 7.509.192,00	Rp 5.088.115	210
Beban Langganan Air	Rp 85.426.031,00	Rp 135.114.101,00	Rp 49.688.070	58
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Rp 57.475.029,00	Rp 91.661.224,00	Rp 34.186.195	0
Beban Sewa	Rp -	Rp 327.900.000,00	Rp 327.900.000	
Beban Jasa Profesi	Rp 1.300.000,00	Rp 230.000.000,00	Rp 228.700.000	17.592
Beban Jasa Lainnya	Rp 805.065.002,00	Rp 781.193.788,00	Rp (23.871.214)	-3
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 294.774.000,00	Rp 860.422.000,00	Rp 565.648.000	192
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 176.185.400,00	Rp 288.944.930,00	Rp 112.759.530	64
Beban Pemeliharaan Jaringan	Rp 48.168.800,00	Rp 63.185.490,00	Rp 15.016.690	0
Beban Perjalanan Dinas Biasa	Rp 84.268.629,00	Rp 2.367.998.034,00	Rp 2.283.729.405	2.710
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 10.800.000,00	Rp 1.590.800.000,00	Rp 1.580.000.000	14.630
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp -	Rp 75.190.000,00	Rp 75.190.000	#DIV/0!
Jumlah Belanja Neto	Rp 7.850.264.263,00	Rp 20.771.166.081,00	Rp 12.920.901.818	164,59

Belanja Modal Tanah
Rp0,00

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal Tanah TA.2025 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

Tabel 11
Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Sertifikat Tanah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp0,00

B.7 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 .

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2025 sudah

terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
Pengadaan Mobil Dinas Innova Zenix	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	#DIV/0!

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,00

B.8. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 13, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA.2025 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-25	31-Dec-14	Naik (Turun) %
Renovasi Gedung PTSP	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0,00.

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA.2025 sudah terealisasi senilai Rp0,00 berupa :

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal

Lainnya Rp0,0

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Belanja Bantuan

Sosial Rp0,00

B.11. Belanja Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan tidak memiliki Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00.

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Saldo UP	-	-
2	Kuitansi UP	-	-
Jumlah		-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	0
Jumlah		-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp1.508.050,00

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp1.508.050,00 (Netto) dan Rp0,00.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 17.

Tabel 17
Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Nov. sampai Des 2025	405.550	
2	Pengembalian Tunjangan Fungsional (yang melekat pada gaji) bulan Okt. Sampai Des 2025	1.102.500	
Jumlah		1.508.050	-

Mutasi piutang PNBPN pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	1.508.050
Mutasi tambah:	
Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.508.050

Bag Lancar TGR Rp0,00

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 18 adalah nihil

Tabel 18
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2024	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0,00

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Bag. Lancar
TP/TGR Rp(7.541,00)

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp(7.541,00) dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00. Adalah berupa Pengembali Tunjangan Kinerja Bulan November sampai Desember dan Pengembalian Tunjangan Fungsional (yang melekat

pada gaji) bulan Oktober sampai Desember 2025.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek pada tanggal Pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyusutan
	Lancar	-	0,00%	-
	Lancar	-	0,00%	-
Jumlah				-

Belanja dibayar dimuka
Rp0,00

C.8. Belanja di Bayar Di Muka

Saldo Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/Jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

Tabel 20
Rincian Belanja dibayar dimuka

No	Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
1	NIHIL	-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Persediaan
Rp193.200,00.

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp193.200,00 dan Rp1.671.160,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Persediaan

No	Persediaan	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Barang Konsumsi	193.200	1.235.000
2	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Bahan Baku	-	-
5	Persediaan Lainnya	-	436.160
Jumlah		193.200	1.671.160

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berupa Barang Konsumsi, Barang untuk Pemeliharaan, Bahan Baku (Solar) dan Persediaan Lainnya (obat-obatan).

Bagian Lancar TGR
Rp0,00

C.10.Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 21 adalah Nihil.

Tabel 22
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1		-	-
2		0	0
Jumlah		-	-

Sedangkan mutasi Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2025	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah senilai Rp0,00 merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR jangka panjang sebagai Bagian Lancar di 31 Desember 2025
- Mutasi kurang senilai Rp0,00.

Tagihan Penjualan

Angsuran Rp0,00

C.11. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00. dan Rp0,00.

Tanah

Rp23.070.382.448,00.

C.12. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp23.070.382.448,00 dan Rp23.070.382.448,00.

Rincian saldo tanah per TA.2025 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas	Nilai
1	`001	1.800	1.527.836.448,00
2	`001	22.219	17.815.750.000,00
3	`002	3.925	2.905.776.000,00
4	`003	1.109	821.020.000,00
Jumlah		29.053	23.070.382.448,00

Peralatan dan Mesin

Rp11.594.572.335,00.

C.13. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp11.594.572.335,00 dan Rp20.274.862.885,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 20.274.862.885,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Hibah	Rp -
Transfer Masuk	
Perolehan Lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp (9.099.737.250,00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 11.594.572.335,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp (10.825.497.883,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 769.074.452,00

Tidak ada penambahan Aset Peralatan dan Mesin untuk Semester II Tahun 2025, tetapi ada belanja yang membentuk aset yang menggunakan akun belanja barang (52) sehingga masih terdapat ToDoList pada Aplikasi MonSakti berupa **Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN Tidak Wajar** senilai Rp40.073.200. Rincian barangnya sebagai berikut :

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D
1	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028/UP_TUP/238741/2025	21-10-2025	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PT. Sinar Hidup, Biaya Pembelian Bracket TV dalam rangka Pendukung Operasional Kantor BPPP Medan	3050206080	1	1.600.000	1.600.000	'259991330323957
2	BAST NONKONTRAKTUAL	00030/UP_TUP/238741/2025	30-10-2025	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	Jaya Abadi Komputer, Biaya Pembelian dan Instalasi Fingerprint dalam rangka mendukung Operasional Pegawai BPPP Medan	3060207005	1	5.500.000	5.500.000	'259991330337838
3	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037/UP_TUP/238741/2025	'03-11-2025	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	Jaya Abadi Komputer, Biaya Pembelian dan Instalasi CCTV IPCAM 4 Camera Lingkup BPPP Medan	3050105007	1	8.000.000	8.000.000	'259991330391590
4	BAST NONKONTRAKTUAL	'00061	20-10-2025	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Azko, Biaya Pembelian Alat Kantor Berupa Smart TV LG dalam Mendukung Operasional Kantor BPPP Medan	3050206002	1	7.899.000	7.899.000	'259991330335811
5	BAST NONKONTRAKTUAL	'00062	20-10-2025	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Azko, Biaya Pembelian Alat Kantor Berupa Brankas dalam rangka Pengamanan Kas Fisik Keuangan BPPP Medan	3050104007	1	4.299.000	4.299.000	'259991330335811
6	BAST NONKONTRAKTUAL	'00070	'03-11-2025	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Informa Medan, Biaya Pembelian Alat Kantor Berupa 2 unit Meja Rapat dalam rangka operasional BPPP Medan	3050201008	2	6.387.600	12.775.200	'259991330367236
JUMLAH										40.073.200	

Gedung dan Bangunan
Rp22.696.410.007,00.

C.14. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp22.696.410.007,00 dan Rp22.696.410.007,00 ada mutasi bertambah dan berkurang pada Semester II Tahun 2025.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	22.696.410.007,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Transfer Masuk	
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Reklas	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2025	22.696.410.007,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.628.672.689,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	18.067.737.318,00

Tidak ada mutasi bertambah untuk Gedung dan Bangunan pada Semester I TA. 2025.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.480.462.700,00.

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.480.462.700,00 dan Rp5.526.972.700,00 tidak ada penambahan nilai aset pada jalan, irigasi dan jaringan di Tahun 2025.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	5.480.462.700,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Informasi Teknologi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.480.462.700,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.960.453.355,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.520.009.345,00

Tidak Ada transaksi penambahan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2025 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Aset Tetap Lainnya
Rp62.748.900,00.

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp62.748.900,00 dan Rp62.748.900,00 tidak ada penambahan pada Tahun 2025 pada Aset Tetap Lainnya.

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 62.748.900,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Hibah	Rp -
Reklasifikasi	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 62.748.900,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 62.748.900,00

Aset Tetap Lainnya yaitu berupa monografi (Buku Perpustakaan) sebanyak 258 buah senilai Rp32.620.400,00 CD/VCD/DVD sebanyak 12 buah senilai Rp29.628.500,00 dan Peta sebanyak 1 buah senilai Rp500.000,00.

Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp0,00.

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(19.414.623.927,00)

C.18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(19.414.623.927,00) dan Rp(27.565.774.274,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per TA.2025 disajikan pada Tabel 24, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 24
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 20.274.862.885,00	Rp 10.939.082.654,00	Rp 9.335.780.231,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp 22.696.410.007,00	Rp 4.920.467.882,00	Rp 17.775.942.125,00
3	Jalan dan Jembatan	Rp 3.484.405.050,00	Rp 3.327.806.398,00	Rp 156.598.652,00
4	Irigasi	Rp 1.115.877.000,00	Rp 513.017.435,00	Rp 602.859.565,00
5	Jaringan	Rp 880.180.650,00	Rp 298.983.150,00	Rp 581.197.500,00
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 62.748.900,00	Rp -	Rp 62.748.900,00
7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	Rp -	Rp 8.720.363.750,00	Rp (8.720.363.750,00)
Akumulasi Penyusutan		Rp 48.514.484.492,00	Rp 28.719.721.269,00	Rp 19.414.623.927,00

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.19. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan berupa software yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember TA.2025 disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
	NIHIL	
Jumlah		Rp -

Aset Lain-lain Rp0,00.

C.20. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp346.955.000,00. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sudah dilakukan penghapusan oleh KPKNL dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 346.955.000,00
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp -
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp -
- penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp -
Akumulasi Penyusutan	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp -

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain pada Semester II Tahun 2025.

Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya
Rp(8.720.363.750,00)

C.21. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(8.720.363.750,00) dan Rp(346.955.000,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per TA.2025 sebagai berikut :

Tabel. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -

C.3 Piutang Jangka Panjang

Tuntutan Perbendaharaan
Rp0,00.

C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah
	NIHIL	
	Jumlah	Rp0,00

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp0,00
Mutasi tambah:	Rp0,00
- TGR	Rp0,00
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	Rp0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp0,00

Penyisihan Piutang tak
Tertagih - Tuntutan
Perbendaharaan Rp0,00

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
	Lancar	-	0,00%	-
	Lancar	-	0,00%	-
Total				-

Aset Lainnya Rp0,00

C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-Lain	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		Rp -	Rp -
Nilai Buku per 30 Juni 2025		Rp -	Rp -

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan berupa software yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per TA.2025 disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	NIHIL	
2		
3		
Jumlah		Rp -

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00.

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Kepada Pihak
Ketiga R27.095.246,00

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp27.095.246,00 dan Rp40.841.074,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang sudah dibayar	Rp -	-
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp -	-
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Rp 27.095.246	-
Total		Rp 27.095.246	-

Utang yang belum
ditagihkan Rp0,00.

C.5.2 Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang yang belum ditagihkan merupakan belanja perjalanan dinas yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah yang belum dibayarkan.

Tabel 31 .
Rincian Utang yang belum ditagihkan

No	Uraian	2024
1	-	Rp -
Total		Rp -

Ekuitas
Rp42.879.817.334,00.

C.26. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp42.879.817.334,00 dan Rp43.979.922.752,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00.

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Saldo UP	-	-
2	Kuitansi UP	-	-
Jumlah		-	-

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0,00

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas disajikan dalam Tabel 16.

Tabel 16
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	0
Jumlah		-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp1.508.050,00

C.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp1.508.050,00 (Netto) dan Rp0,00.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan dalam Tabel 17.

Tabel 17
Rincian Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Pengembalian Tunjangan Kinerja Bulan Nov. sampai Des 2025	405.550	
2	Pengembalian Tunjangan Fungsional (yang melekat pada gaji) bulan Okt. Sampai Des 2025	1.102.500	
Jumlah		1.508.050	-

Mutasi piutang PNBPN pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	1.508.050
Mutasi tambah:	
Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	-
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	-
Saldo per 31 Desember 2025	1.508.050

Bag Lancar TGR Rp0,00

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 18 adalah nihil

Tabel 18
Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	-	-	-
Jumlah		-	-

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2024	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0,00

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih – Bag. Lancar
TP/TGR Rp(7.541,00)

C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 senilai Rp(7.541,00) dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00. Adalah berupa Pengembali Tunjangan Kinerja Bulan November sampai Desember dan Pengembalian Tunjangan Fungsional (yang melekat

pada gaji) bulan Oktober sampai Desember 2025.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek pada tanggal Pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Pendek

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	%	Nilai Penyusutan
	Lancar	-	0,00%	-
	Lancar	-	0,00%	-
Jumlah				-

Belanja dibayar dimuka
Rp0,00

C.8. Belanja di Bayar Di Muka

Saldo Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/Jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa diterima seluruhnya. Rincian belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut :

Tabel 20
Rincian Belanja dibayar dimuka

No	Jenis	31-Dec-25	31-Dec-24
1	NIHIL	-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

Persediaan
Rp193.200,00.

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp193.200,00 dan Rp1.671.160,00.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Persediaan

No	Persediaan	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Barang Konsumsi	193.200	1.235.000
2	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Bahan Baku	-	-
5	Persediaan Lainnya	-	436.160
Jumlah		193.200	1.671.160

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik berupa Barang Konsumsi, Barang untuk Pemeliharaan, Bahan Baku (Solar) dan Persediaan Lainnya (obat-obatan).

Bagian Lancar TGR
Rp0,00

C.10.Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Tagihan TP/TGR tersaji dalam Tabel 21 adalah Nihil.

Tabel 22
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1		-	-
2		0	0
Jumlah		-	-

Sedangkan mutasi Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi tambah:	
Bag Lancar Tagihan TP/TGR 2025	0
Mutasi kurang:	
Pelunasan tahun 2025	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mutasi tambah senilai Rp0,00 merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR jangka panjang sebagai Bagian Lancar di 31 Desember 2025
- Mutasi kurang senilai Rp0,00.

Tagihan Penjualan

Angsuran Rp0,00

C.11. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah senilai Rp0,00. dan Rp0,00.

Tanah

Rp23.070.382.448,00.

C.12. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp23.070.382.448,00 dan Rp23.070.382.448,00.

Rincian saldo tanah per TA.2025 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23
Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas	Nilai
1	`001	1.800	1.527.836.448,00
2	`001	22.219	17.815.750.000,00
3	`002	3.925	2.905.776.000,00
4	`003	1.109	821.020.000,00
Jumlah		29.053	23.070.382.448,00

Peralatan dan Mesin

Rp11.594.572.335,00.

C.13. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp11.594.572.335,00 dan Rp20.274.862.885,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 20.274.862.885,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Hibah	Rp -
Transfer Masuk	
Perolehan Lainnya	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp (9.099.737.250,00)
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 11.594.572.335,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp (10.825.497.883,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 769.074.452,00

Tidak ada penambahan Aset Peralatan dan Mesin untuk Semester II Tahun 2025, tetapi ada belanja yang membentuk aset yang menggunakan akun belanja barang (52) sehingga masih terdapat ToDoList pada Aplikasi MonSakti berupa **Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN Tidak Wajar** senilai Rp40.073.200. Rincian barangnya sebagai berikut :

No	Dok. Sumber	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Akun	Uraian Akun	Keterangan	Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total	No. SP2D
1	BAST NONKONTRAKTUAL	'00028/UP_TUP/238741/2025	21-10-2025	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	PT. Sinar Hidup, Biaya Pembelian Bracket TV dalam rangka Pendukung Operasional Kantor BPPP Medan	3050206080	1	1.600.000	1.600.000	'259991330323957
2	BAST NONKONTRAKTUAL	00030/UP_TUP/238741/2025	30-10-2025	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	Jaya Abadi Komputer, Biaya Pembelian dan Instalasi Fingerprint dalam rangka mendukung Operasional Pegawai BPPP Medan	3060207005	1	5.500.000	5.500.000	'259991330337838
3	BAST NONKONTRAKTUAL	'00037/UP_TUP/238741/2025	'03-11-2025	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	Jaya Abadi Komputer, Biaya Pembelian dan Instalasi CCTV IPCAM 4 Camera Lingkup BPPP Medan	3050105007	1	8.000.000	8.000.000	'259991330391590
4	BAST NONKONTRAKTUAL	'00061	20-10-2025	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Azko, Biaya Pembelian Alat Kantor Berupa Smart TV LG dalam Mendukung Operasional Kantor BPPP Medan	3050206002	1	7.899.000	7.899.000	'259991330335811
5	BAST NONKONTRAKTUAL	'00062	20-10-2025	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Azko, Biaya Pembelian Alat Kantor Berupa Brankas dalam rangka Pengamanan Kas Fisik Keuangan BPPP Medan	3050104007	1	4.299.000	4.299.000	'259991330335811
6	BAST NONKONTRAKTUAL	'00070	'03-11-2025	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Informa Medan, Biaya Pembelian Alat Kantor Berupa 2 unit Meja Rapat dalam rangka operasional BPPP Medan	3050201008	2	6.387.600	12.775.200	'259991330367236
JUMLAH										40.073.200	

Gedung dan Bangunan
Rp22.696.410.007,00.

C.14. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp22.696.410.007,00 dan Rp22.696.410.007,00 ada mutasi bertambah dan berkurang pada Semester II Tahun 2025.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	22.696.410.007,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Transfer Masuk	
Koreksi pencatatan nilai penambahan daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Reklas	
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2025	22.696.410.007,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.628.672.689,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	18.067.737.318,00

Tidak ada mutasi bertambah untuk Gedung dan Bangunan pada Semester I TA. 2025.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp5.480.462.700,00.

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.480.462.700,00 dan Rp5.526.972.700,00 tidak ada penambahan nilai aset pada jalan, irigasi dan jaringan di Tahun 2025.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	5.480.462.700,00
Mutasi tambah:	
Pengembangan Informasi Teknologi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi nilai	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.480.462.700,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(3.960.453.355,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.520.009.345,00

Tidak Ada transaksi penambahan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2025 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan.

Aset Tetap Lainnya
Rp62.748.900,00.

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp62.748.900,00 dan Rp62.748.900,00 tidak ada penambahan pada Tahun 2025 pada Aset Tetap Lainnya.

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 62.748.900,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Hibah	Rp -
Reklasifikasi	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	Rp -
Penghapusan	Rp -
Saldo per 31 Desember 2025	Rp 62.748.900,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp 62.748.900,00

Aset Tetap Lainnya yaitu berupa monografi (Buku Perpustakaan) sebanyak 258 buah senilai Rp32.620.400,00 CD/VCD/DVD sebanyak 12 buah senilai Rp29.628.500,00 dan Peta sebanyak 1 buah senilai Rp500.000,00.

Konstruksi dalam
Pengerjaan Rp0,00.

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp(19.414.623.927,00)

C.18. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(19.414.623.927,00) dan Rp(27.565.774.274,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per TA.2025 disajikan pada Tabel 24, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tabel 24
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 20.274.862.885,00	Rp 10.939.082.654,00	Rp 9.335.780.231,00
2	Gedung dan Bangunan	Rp 22.696.410.007,00	Rp 4.920.467.882,00	Rp 17.775.942.125,00
3	Jalan dan Jembatan	Rp 3.484.405.050,00	Rp 3.327.806.398,00	Rp 156.598.652,00
4	Irigasi	Rp 1.115.877.000,00	Rp 513.017.435,00	Rp 602.859.565,00
5	Jaringan	Rp 880.180.650,00	Rp 298.983.150,00	Rp 581.197.500,00
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 62.748.900,00	Rp -	Rp 62.748.900,00
7	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintah	Rp -	Rp 8.720.363.750,00	Rp (8.720.363.750,00)
Akumulasi Penyusutan		Rp 48.514.484.492,00	Rp 28.719.721.269,00	Rp 19.414.623.927,00

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.19. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan berupa software yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember TA.2025 disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
	NIHIL	
Jumlah		Rp -

Aset Lain-lain Rp0,00.

C.20. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp346.955.000,00. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sudah dilakukan penghapusan oleh KPKNL dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp 346.955.000,00
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp -
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp -
- penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2025	Rp -
Akumulasi Penyusutan	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp -

Tidak ada transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain pada Semester II Tahun 2025.

Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Lainnya
Rp(8.720.363.750,00)

C.21. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(8.720.363.750,00) dan Rp(346.955.000,00).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per TA.2025 sebagai berikut :

Tabel. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -

C.3 Piutang Jangka Panjang

Tuntutan Perbendaharaan
Rp0,00.

C.3.1 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 26.

Tabel 26
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah
	NIHIL	
	Jumlah	Rp0,00

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp0,00
Mutasi tambah:	Rp0,00
- TGR	Rp0,00
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR	Rp0,00
Saldo per 31 Desember 2025	Rp0,00

Penyisihan Piutang tak
Tertagih - Tuntutan
Perbendaharaan Rp0,00

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
	Lancar	-	0,00%	-
	Lancar	-	0,00%	-
Total				-

Aset Lainnya Rp0,00

C.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 28.

Tabel 28
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Dec-25	31-Dec-24
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-Lain	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		Rp -	Rp -
Nilai Buku per 30 Juni 2025		Rp -	Rp -

Aset Tak Berwujud Rp0,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan berupa software yang digunakan untuk

menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per TA.2025 disajikan pada Tabel 29.

Tabel 29
Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1	NIHIL	
2		
3		
Jumlah		Rp -

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00.

C.5.2 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang Kepada Pihak
Ketiga R27.095.246,00

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp27.095.246,00 dan Rp40.841.074,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan per tanggal pelaporan disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang sudah dibayar	Rp -	-
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp -	-
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Rp 27.095.246	-
Total		Rp 27.095.246	-

Utang yang belum
ditagihkan Rp0,00.

C.5.2 Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang yang belum ditagihkan merupakan belanja perjalanan dinas yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah yang belum dibayarkan.

Tabel 31 .
Rincian Utang yang belum ditagihkan

No	Uraian	2024
1	-	Rp -
Total		Rp -

Ekuitas
Rp42.879.817.334,00.

C.26. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp42.879.817.334,00 dan Rp43.979.922.752,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.